



LAMPIRAN

KOMPENDIUM PRAKTIK BAIK

demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
untuk anak di Indonesia

2021

1 Pengembangan Holistik dan Integratif untuk Anak Usia Dini: Pendekatan Kebijakan hingga Praktik	Nusa Tenggara Timur	2
2 Model Inklusif dan Partisipasif bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan Terdesentralisasi	Sulawesi Selatan	6
3 Gerakan Kembali Bersekolah: Upaya Multisektor untuk Menangani Anak Tidak Sekolah	Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	9
4 Meningkatkan Literasi Siswa Kelas Awal di Sekolah Perdesaan dan Terpencil	Papua & Papua Barat	13
5 Peran Forum Masyarakat dalam Pendidikan Desa dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kehadiran Anak di Sekolah	Jawa Tengah	17



Pengembangan Holistik dan Integratif untuk Anak Usia Dini: Pendekatan Kebijakan hingga Praktik

Topik: Pendidikan dan pengembangan anak usia dini

Lokasi: Nusa Tenggara Timur (Kupang)

Rangkuman Pendekatan

Temuan dari sebuah studi baseline yang dilakukan pada awal tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar pusat pendidikan dan pengembangan anak usia dini cenderung berbasis komunitas, kekurangan pendanaan, dan hanya menerima dukungan operasional yang terbatas baik dari masyarakat maupun pemerintah. Studi baseline ini mengungkapkan beberapa tantangan dalam mencapai pengembangan yang holistik dan integratif untuk anak usia dini (PAUD-HI) di setiap penyedia pendidikan. Sebagian besar penyedia layanan pendidikan tidak memiliki staf terlatih serta bahan pengajaran dan pembelajaran dasar. Selain itu, tidak adanya fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan yang memadai, menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak. Standar keselamatan dan pengamanan untuk anak-anak juga sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Tidak ada layanan gizi – tidak ada makanan bergizi yang diberikan kepada anak dan tidak ada informasi tentang gizi anak yang diberikan kepada orang tua. Koordinasi dengan layanan kesehatan pun juga cenderung kurang baik. Orang tua memiliki akses terbatas ke kelas pengasuhan anak.

Bekerja sama dengan berbagai pihak pembuat kebijakan di tingkat lokal, 100 pusat PAUD-HI di perdesaan dan daerah terpencil di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan PAUD-HI. Program ini mengembangkan sistem pendampingan model yang memperkuat pengajaran dan pelatihan dan mengintegrasikan kesehatan, gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan anak, dan pendidikan pengasuhan anak. Selain peningkatan kualitas dan praktik PAUD-HI, program ini memperbaiki lingkungan pembelajaran, meningkatkan pendanaan dan dukungan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dan orang tua, dan mengembangkan alat dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program.

Layanan PAUD-HI berhasil diperkuat sebagai hasil dari beberapa pendekatan:

- Pengadaan sumber daya dan peluang untuk meningkatkan pembelajaran dan memperbaiki praktik dan sistem pelatihan/pendampingan guru
- Pelatihan guru: Pelatihan untuk guru dan pendamping dengan berfokus pada berbagai pokok bahasan, terutama tentang Kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD) nasional tahun 2013, termasuk standar pencapaian dan pengembangan, membangun pendampingan, dan metodologi ruang kelas.
- Rapat klaster: Salah satu pusat pendidikan memberikan peluang bagi guru PAUD-HI untuk berkumpul merencanakan kegiatan, mendiskusikan masalah, melatih keterampilan, dan memperoleh pengetahuan baru.
- Sistem pendampingan: Pendamping bekerja sama dengan guru, pengelola pusat, kepala desa, dan masyarakat secara langsung untuk meraih hasil yang optimal. Modul pendampingan yang disusun melalui program ini dapat digunakan dengan berbagai cara.



Pengawas PAUD dapat menggunakannya untuk memperkuat pendekatan terkait pengawasan dan menjalin hubungan dengan pengelola dan guru; kepala sekolah di tiap klaster dapat memandu diskusi guru dan membentuk komunitas dalam klaster; pengelola dapat membentuk komunitas pembelajaran bersama semua guru di pusat pengembangan anak usia dini mereka; dan jika kabupaten mengadopsi pendekatan ini, mereka dapat menggunakannya dalam pendampingan guru perorangan.

- Meningkatkan standar: Terdapat dua proses untuk membantu pengelola dan guru mengidentifikasi bidang yang akan diperkuat, yakni penilaian mandiri dan prosedur operasional standar. Alat penilaian mandiri disusun agar lembaga PAUD-HI semakin mengerti cara meningkatkan kualitas lembaga PAUD-HI.
- Pengasuhan dan pelibatan masyarakat: UNICEF mendukung pembentukan komite sekolah oleh lembaga PAUD-HI untuk tujuan koordinasi dengan pengelola serta persatuan orang tua murid dan guru (POMG). Diharapkan orang tua dan guru dapat menyusun rencana bersama untuk membahas persoalan dan/atau mempelajari pokok bahasan yang menjadi perhatian. Mentor juga didorong untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk bekerja sama dengan pengelola serta guru PAUD-HI guna menguatkan kemampuan promosi lembaga. Pendekatan dengan berbagai unsur ini membantu meningkatkan rasa memiliki dan perhatian masyarakat terhadap kegiatan serta status lembaga PAUD-HI (misalnya fasilitas atau akreditasi) di daerahnya.
- Pengembangan sumber daya: 10 modul kurikulum disesuaikan agar lebih mudah dipahami guru/penggunanya untuk kondisi setempat serta agar program dapat mudah diadaptasi oleh kabupaten/provinsi lain (misalnya dengan mengubah sebagian gambar atau contoh spesifik), tanpa harus mengubah isinya. Sumber daya lain yang dikembangkan untuk program ini meliputi: 30 buku anak yang ditulis oleh mentor dan guru lembaga PAUD-HI; pedoman penggunaan materi belajar (mencakup contoh kegiatan dan cara adaptasi untuk anak penyandang disabilitas); serta modul tentang implementasi program “kebun-kantin-koperasi” di masyarakat sekitar lembaga PAUD-HI dan dukungan pengembangan karakter (berisi indikator dasar untuk anak, orang tua, serta guru).

Capaian perkembangan pada anak-anak yang lebih baik:

- Terdapat peningkatan yang nyata (menurut sistem yang mengukur kualitas dan capaian pembelajaran usia dini) pada anak-anak yang belajar di sekolah intervensi atau yang menerapkan program dibandingkan anak-anak yang belajar di sekolah non-intervensi dan anak-anak yang tidak bersekolah.

Hasil Penting yang Dicapai

Lingkungan lembaga PAUD yang lebih aman (100 PAUD intervensi)

- 93 persen memperbaiki taman bermain agar sesuai dengan standar keamanan
- 100 persen mengembangkan prosedur standar terkait keamanan anak
- 83 persen meningkatkan akses air bersih
- 93 persen memperbaiki fasilitas sanitasi serta menyediakan toilet dan tempat cuci tangan yang dapat diakses dan sistem pembuangan limbah.



Hasil Penting yang Dicapai	<p>Pengelolaan yang lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 persen lembaga PAUD mengembangkan prosedur standar operasional sebagai pedoman pengelolaan dan kegiatan sekolah • 100 persen guru mempersiapkan rencana program pengembangan mingguan dan rencana pembelajaran harian • 100 persen sekolah membentuk komite sekolah serta mengadakan pertemuan rutin orang tua-guru <p>Meningkatnya pelibatan orang tua dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi orang tua dalam pertemuan orang tua meningkat menjadi 85 persen • Terdapat peningkatan dukungan dari masyarakat terhadap lembaga PAUD masing-masing; • Semakin banyak lembaga (82 persen) yang mendapatkan alokasi dana melalui Dana Desa. 	
	Replikasi/ peningkatan skala program	Biaya
Keterampilan		<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pendampingan • Pemantauan
Pemangku kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud • Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT), Selandia Baru • Yayasan Alpha Omega (YAO)
Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mentor yang diperlukan sebaiknya ditentukan dari jumlah kecamatan dan lembaga PAUD-HI serta ukuran kecamatan (beberapa kecamatan dapat membutuhkan lebih dari satu mentor). Mentor di Kupang yang tinggal dan bekerja di wilayah yang sama, menunjukkan dampak positif yang signifikan (tidak mengikuti area kerja dinas pendidikan kabupaten atau yang berasal dari wilayah yang berbeda). • Tiap kabupaten harus mendukung pengembangan minimal satu lembaga PAUD-HI terakreditasi "A" yang dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan profesional di lapangan. Sesi pengembangan keahlian profesional yang komprehensif untuk guru sebaiknya disusun, termasuk observasi guru dengan pemberian arahan dan lokakarya sore terkait pokok bahasan. • Kemendikbud dapat mendukung kabupaten untuk membentuk dan melaksanakan gugus tugas PAUD- HI. Kemendikbud juga dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi untuk membentuk gugus tugas serupa di tingkat provinsi karena terbatasnya wewenang dinas pendidikan provinsi. 	



	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa indikator dalam alat penilaian mandiri program telah disertakan dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena 2018). Alat tersebut juga merupakan sarana yang baik bagi pihak PAUD-HI dalam memantau programnya masing-masing. Mentor dapat menginformasikan alat tersebut pada pertemuan klaster dan mendorong tiap lembaga PAUD untuk menggunakannya.
Referensi dan informasi lebih lanjut	<p>Sumber daya yang tersedia di situs web Kemendikbud “Ruang Guru PAUD” dikembangkan dari program percontohan ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• ECE Mentoring Programme: https://s.id/ece-mentoring• Modul Mentoring Waikato https://s.id/modul-waikato• Petunjuk Teknis Replikasi Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif (PAUD-HI) Program Kupang: https://s.id/replikasi-kupang <p>Video:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem pendampingan (4,46 menit): www.youtube.com/watch?v=wquvSN20pFs&t=29s• Program dan advokasi secara umum (5 menit): www.youtube.com/watch?v=1vt4OtZ1Bn0&t=47s• Program PAUD-HI dari kacamata guru (3 menit): www.youtube.com/watch?v=KE05Z_dn9Ew• Program PAUD-HI dari kacamata anak (1,5 menit): www.youtube.com/watch?v=bFs4Ydm9MY&t=15s• Pelatihan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic) untuk Guru PAUD di Kupang (5 menit): www.youtube.com/watch?v=NjPUP473Z-c&feature=youtu.be <p>Publication:</p> <ul style="list-style-type: none">• “Holistic, Integrative Early Childhood Development (HI-ECD) Programme Kupang, NTT, Indonesia: From Policy to Practice: An Approach That Works”• Studi Data Awal dan Data Akhir terhadap Program PAUD-HI di Kupang tahun 2017 dan 2020
Informasi kontak	<ul style="list-style-type: none">• Yudhistira Yewangoe, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF – Kupang (yyewangoe@unicef.org)• Nugroho Indera Warman, Spesialis Pendidikan UNICEF (nwarman@unicef.org)• Immanuel Buan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang



Model Inklusif dan Partisipatif bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan Terdesentralisasi

Topik: Pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif

Lokasi: Sulawesi Selatan (Bone dan Pangkajene Kepulauan)

Rangkuman Pendekatan

UNICEF bersama Helen Keller Indonesia sebagai mitra pelaksana mendukung Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bone untuk menguji coba program pendidikan inklusif di sekolah dasar dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dukungan tersebut bertujuan untuk: (1) memperkuat peran kelompok kerja pendidikan inklusif di tingkat kabupaten dalam mengoordinasi dan melaksanakan program serta (2) membangun kesadaran dan kapasitas pihak pengelola sekolah, guru, dan pemangku kepentingan. Program ini menyoar 62 sekolah di Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep, dengan 75 persen merupakan sekolah negeri dan 25 persen madrasah.

Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan surat keputusan tentang pendidikan inklusif pada tahun 2011 yang kemudian diikuti surat keputusan wali kota/bupati di beberapa wilayah. Untuk melaksanakan surat keputusan tersebut, kelompok kerja multisektor beranggotakan perwakilan dari berbagai dinas dibentuk dan ditugaskan untuk menyusun strategi umum sebagai panduan pelaksanaan program. Meskipun begitu, terdapat bukti bahwa banyak tantangan dalam memastikan akses ke pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Sebagian besar anak-anak penyandang disabilitas (misalnya anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, atau tunadaksa) disekolahkan di sekolah luar biasa (SLB) yang jumlahnya masih sedikit. Sekolah non-SLB kemungkinan besar tidak akan menerima mereka, terutama karena guru tidak terlatih dan sekolah tidak memiliki fasilitas dan kurikulum yang diperlukan.

Saat program dimulai pada tahun 2018, kedua kabupaten telah berada pada tahap perkembangan yang berbeda. Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah dinyatakan sebagai kabupaten inklusif sejak tahun 2014, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bone telah mengeluarkan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak penyandang disabilitas.

Intervensi UNICEF bertujuan untuk mendukung kelompok kerja multisektor dalam mengatasi persoalan pendidikan inklusif di sekolah sasaran melalui tiga strategi yang saling terkait: advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan kampanye publik. Tujuannya adalah untuk menguatkan koordinasi dan advokasi guna memperoleh dukungan yang lebih besar. Pelatihan bagi pelatih (*training of trainer*) diadakan untuk mempersiapkan fasilitator, yang kemudian akan melatih guru di sekolah sasaran dalam hal pelaksanaan program, termasuk cara mengidentifikasi anak penyandang disabilitas, memahami kebutuhannya, berkomunikasi dengan mereka, mengendalikan perilaku, dan memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mereka.

Kelompok kerja program pendidikan inklusif dipimpin oleh Bappeda dengan anggota dari berbagai mitra utama, seperti dinas pendidikan dan kebudayaan, kantor kementerian agama, dinas sosial, badan pusat statistik, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Kelompok kerja tersebut mengadakan rapat koordinasi setiap tiga bulan untuk membahas perkembangan dan



	<p>persoalan selama pelaksanaan dan menyusun strategi umum terkait pendidikan inklusif yang berfungsi sebagai dokumen komprehensif untuk seluruh lembaga yang terlibat.</p> <p>Penerima manfaat utama merupakan sekolah dan para siswa. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan memahami pentingnya menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah dan oleh karena itu, mencoba mengumpulkan data di tingkat desa terkait anak-anak usia sekolah penyandang disabilitas. Dibantu oleh organisasi masyarakat sipil dan mitra swasta, tim gabungan ditugaskan untuk mengumpulkan data di tingkat rumah tangga di desa percobaan. Upaya <i>ad hoc</i> ini berhasil mengumpulkan data, meski dengan jangkauan terbatas dan keberlanjutan yang belum terjamin.</p> <p>Di dua kabupaten tersebut, kegiatan kampanye berhasil menarik minat berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta. Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, kampanye dan olimpiade olahraga berskala besar diadakan pada tahun 2019 dengan melibatkan sekitar 200 murid penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bone, kelompok kerja aktif melibatkan tokoh agama untuk mempromosikan pendidikan inklusif.</p>							
<p>Hasil Penting yang Dicapai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Training of trainer</i> menghasilkan 18 fasilitator, empat pelatih untuk tingkat provinsi dan 14 pelatih untuk tingkat kabupaten. • 619 guru mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif, sehingga mereka mampu mengidentifikasi jenis disabilitas, mengembangkan praktik pengajaran yang tepat, dan menguasai kelas. • Lebih dari 22.500 siswa (48,3 persen di antaranya perempuan) memperoleh manfaat dari penggunaan metode belajar inklusif, seperti pembelajaran adaptif untuk anak berkebutuhan khusus, penggunaan alat pembelajaran khusus, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas, sehingga siswa penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam kegiatan belajar, olahraga, dan sosial. • 549 siswa sekolah penyandang disabilitas yang diidentifikasi guru di 66 sekolah berada di lingkungan yang inklusif dengan adanya kebijakan sekolah dan pengembangan praktik yang inklusif. • Kelompok kerja berhasil menghasilkan strategi yang komprehensif untuk periode empat tahun (2017-2020). Strategi tersebut mengatur koordinasi antarlembaga guna memastikan kesesuaian dan keefektifan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 							
<p>Replikasi/ peningkatan skala program</p>	<p>Replikasi dibahas bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga kabupaten terpilih (Talakar, Maros, Bulukumba) sebagai sasaran untuk tahun 2021.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="497 1541 491 1704"> <p>Biaya</p> </td> <td data-bbox="497 1541 1468 1704"> <ul style="list-style-type: none"> • Training of trainer: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Pelatihan bagi guru: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Rapat koordinasi kelompok kerja (APBD): Rp1 juta (68 dolar AS)/ rapat </td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1711 491 1809"> <p>Kete-rampilan</p> </td> <td data-bbox="497 1711 1468 1809"> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan modul pelatihan • Penerapan metode pembelajaran inklusif </td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1816 491 2045"> <p>Pemangku kepen-tingan</p> </td> <td data-bbox="497 1816 1468 2045"> <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan kabupaten/kota • Kantor Kementerian Agama Provinsi • Pihak pengelola sekolah (kepala sekolah, karyawan, dan guru) • Pengawas sekolah </td> </tr> </table>	<p>Biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Training of trainer: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Pelatihan bagi guru: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Rapat koordinasi kelompok kerja (APBD): Rp1 juta (68 dolar AS)/ rapat 	<p>Kete-rampilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan modul pelatihan • Penerapan metode pembelajaran inklusif 	<p>Pemangku kepen-tingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan kabupaten/kota • Kantor Kementerian Agama Provinsi • Pihak pengelola sekolah (kepala sekolah, karyawan, dan guru) • Pengawas sekolah
<p>Biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Training of trainer: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Pelatihan bagi guru: Rp12 juta (820 dolar AS)/sesi pelatihan • Rapat koordinasi kelompok kerja (APBD): Rp1 juta (68 dolar AS)/ rapat 							
<p>Kete-rampilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan modul pelatihan • Penerapan metode pembelajaran inklusif 							
<p>Pemangku kepen-tingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan kabupaten/kota • Kantor Kementerian Agama Provinsi • Pihak pengelola sekolah (kepala sekolah, karyawan, dan guru) • Pengawas sekolah 							



Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten membuat proses replikasi menjadi lancar. Koordinasi akan lebih erat seandainya pengawas sekolah terlibat dari tahap awal pelaksanaan proyek.• Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kerangka kerja pemantauan dan strategi evaluasi menyeluruh. Saat ini, kerangka kerja tersebut umumnya hanya terdiri atas kegiatan yang direncanakan, didanai, dan dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing lembaga.• Pendekatan sistematis alih-alih <i>ad hoc</i> dapat lebih efektif mengumpulkan data anak-anak usia sekolah penyandang disabilitas di tingkat desa atau rumah tangga. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan penggunaan platform data yang andal untuk pengumpulan data dan pelibatan berkelanjutan para perangkat desa.
Referensi dan informasi lebih lanjut	<p>Publikasi media UNICEF:</p> <ul style="list-style-type: none">• https://www.instagram.com/p/CEUCykkBcfb/?igshid=ybylqbhgeazv• https://www.facebook.com/172180876204559/posts/3232562166833066/?vh=e&extid=OhYitHPrg8IKo3FN&d=n• https://www.youtube.com/watch?v=gwj_Mxb1hrk <p>Publikasi media lokal:</p> <ul style="list-style-type: none">• https://www.facebook.com/PangkepTelevisi/videos/321194165738224/
Informasi kontak	<ul style="list-style-type: none">• Henky Widjaja, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF – Makassar (hwidjaja@unicef.org)• Anissa Elok Budiyan, Staf Perkembangan Remaja (aebudiyani@unicef.org)• H. Mukhlis Mansur, S. T. – Kepala Sub-Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (mukhlis.mansur@kemdikbud.go.id)



Gerakan Kembali Bersekolah: Upaya Multisektor untuk Menangani Anak Tidak Sekolah

Topik: Anak tidak sekolah

Lokasi: Sulawesi Selatan (Bone dan Takalar), Sulawesi Barat (Mamuju)

Rangkuman Pendekatan

Di Indonesia, terdapat 4 juta lebih (7,9 persen) anak usia sekolah yang tidak bersekolah menurut data tahun 2019. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat angka itu tercatat lebih tinggi, yaitu 9,2 persen dan 11,1 persen berturut-turut dengan sebagian besar terdiri atas anak usia sekolah menengah atas (16-18 tahun). Program anak tidak sekolah bertujuan untuk memastikan anak-anak memperoleh pendidikan, baik melalui sarana formal, non-formal (melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar / PKBM), atau informal. Program ini menggunakan pendekatan komprehensif guna melibatkan pemerintah kabupaten dan desa serta masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan kesempatan belajar kedua untuk anak.

Di Sulawesi Selatan, Bone dan Takalar dipilih sebagai kabupaten sasaran untuk pelaksanaan program. Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bone tertinggi kelima, yaitu 18.600 anak (11,4 persen berusia 18 tahun ke atas), sedangkan ATS di Takalar tertinggi ketujuh dengan 6.400 anak (10,4 persen). Mamuju, kabupaten ibu kota Sulawesi Barat, yang persentase ATS-nya 10,3 persen juga dipilih untuk pelaksanaan program.

Saat UNICEF meluncurkan program tersebut, pihak berwenang di ketiga kabupaten telah menganggap persoalan anak tidak sekolah sebagai permasalahan yang serius dan memahami dampak masifnya pada kesejahteraan anak dan pembangunan manusia. Pada tahun 2016, persoalan ATS telah disertakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan kebijakan Kabupaten Mamuju. Bupati mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur pembentukan tim teknis, penyusunan rencana aksi, alokasi anggaran, dan partisipasi pemerintah kecamatan dan desa untuk menangani ATS. Inisiatif serupa dilakukan di Kabupaten Bone dan Takalar masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.

Kabupaten Bone dan Takalar juga telah meluncurkan 'Gerakan Kembali Bersekolah', sebuah program unggulan yang menarik partisipasi berbagai pemangku kepentingan (misalnya kepala sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan komunitas masyarakat). Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, disusunlah rencana aksi yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga terkait serta langkah koordinasi dan pemantauan untuk memastikan keefektifan dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan pembangunan. Bupati juga mengeluarkan surat keputusan (SK) terkait sistem informasi desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk memiliki Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) sebagai platform data terintegrasi dan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut.

Terlepas dari komitmen yang kuat ini, penetapan sasaran anak putus sekolah tetap menjadi tantangan. Mengidentifikasi siapa dan di mana anak-anak tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama kelompok yang sulit dijangkau. Dalam hal ini, SIPBM memainkan peran penting. Kabupaten sasaran mengadopsi SIPBM sebagai platform pengelolaan data



dan UNICEF membantu mengoptimalkan penggunaannya. Tersedianya data secara langsung membuat penetapan target menjadi akurat dan intervensi menjadi efektif.

UNICEF memfasilitasi adopsi SIPBM ke sistem lokal melalui serangkaian sesi pengembangan kapasitas dan pendampingan untuk staf dan operator. Pemerintah desa sasaran berkontribusi dengan mengalokasikan dana untuk pelatihan, pengadaan server, dan biaya administrasi. Petugas yang ditunjuk di desa sasaran (enam desa di Bone dan empat desa di Mamuju dan juga Talakar) dilatih untuk mengoperasikan SIPBM dan menganalisis datanya. SIPBM mencatat informasi rinci perorangan (misalnya, nama, alamat, alasan putus sekolah, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga). SIPBM juga mengumpulkan informasi tentang kelompok rentan putus sekolah, seperti anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak yang menjadi korban pekerja anak, pelecehan, perundungan, bencana alam, pernikahan anak, dan anak-anak dari keluarga miskin.

Menindaklanjuti upaya advokasi di desa sasaran, peraturan desa dan/atau surat keputusan kepala desa diterbitkan untuk mengatur alokasi Dana Desa demi membantu anak tidak sekolah yang terdata di SIPBM agar dapat mendaftar kembali ke sekolah formal atau nonformal. Ada pula desa yang memutuskan untuk mengelola lembaga pendidikan berbasis masyarakat atau kegiatan pembelajaran lainnya. Tim pendidikan dibentuk di setiap desa untuk memverifikasi dan memvalidasi data SIPBM, merancang dan melaksanakan penjangkauan dan kampanye Gerakan Kembali Bersekolah serta melakukan *monitoring*. Secara keseluruhan, strategi advokasi bertujuan tidak hanya untuk membantu anak-anak yang tidak sekolah, tetapi juga mencegah anak-anak dari kelompok berisiko tinggi agar tidak putus sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Dengan menggunakan data SIPBM terkini, pemerintah desa dapat merancang berbagai program untuk anak tidak sekolah. Di Desa Welado, misalnya, terdaftar di sekolah merupakan syarat untuk menerima dana dari program bantuan sosial. Pemerintah Desa Dungkait mengalokasikan dana untuk mendirikan dan mengelola PKBM sendiri. Pemerintah daerah juga menjalin kemitraan dengan Baznas, sektor swasta, BUMN, dan berbagai unit di bawah Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Hasil Penting yang Dicapai

- SIPBM diadopsi sebagai satu-satunya platform untuk mengumpulkan data, memperbarui informasi dengan target anak-anak tidak sekolah. Sistem ini dipasang di semua desa sasaran dan terhubung ke server yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten.
- Jumlah anak yang kembali bersekolah telah meningkat. Di Bone, sekitar 3.000 anak kembali bersekolah setiap tahunnya. Di Takalar, jumlah anak yang kembali bersekolah berkisar antara 1.789 (2018) dan 1.659 (2019). Sedangkan di Mamuju, 7.000 dari 9.725 ATS kembali bersekolah (2019) dengan sebagian besar ke PKBM.
- Organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta terlibat dalam program ini dengan memberikan berbagai jenis bantuan untuk ATS, baik secara langsung maupun melalui pemerintah daerah.



Replikasi/ peningkatan skala program	<p>Replikasi berlangsung di Sulawesi Selatan. UNICEF memfasilitasi penyusunan rencana aksi provinsi untuk memandu peningkatan program di seluruh kabupaten. Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 disusun dalam Peraturan Gubernur Nomor 71/2020. Target yang diharapkan dicapai pada tahun 2023, Rencana Aksi tersebut digunakan oleh 75 persen kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.</p>	
	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pengumpulan data SIPBM • Pengadaan server • Lokakarya untuk menyusun rencana aksi kabupaten dan desa • Pendampingan untuk pemangku kepentingan desa terkait pendidikan universal • <i>Monitoring</i> dan evaluasi
	Kete-rampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data SIPBM menggunakan aplikasi berbasis Android • Pengelolaan platform data SIPBM • Kampanye dan penjangkauan • Pembentukan kegiatan pembelajaran yang relevan • Manajemen pemangku kepentingan untuk melibatkan mitra
Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan sasaran adalah kunci untuk menjangkau anak-anak tidak sekolah. SIPBM dapat memainkan peran penting dalam pengumpulan data dan penargetan. • Ada potensi besar bahwa sektor swasta memberikan dukungan dan kontribusi untuk program ini. Pelibatan sektor swasta harus dilakukan secara sistematis. • Konsultasi dengan masyarakat setempat penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi solusi potensial yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah di desa atau lingkungan mereka. • Lokasi PKBM sering kali jauh dari desa sasaran atau berada di ibu kota kecamatan. Hal ini menimbulkan hambatan baru bagi anak tidak sekolah yang memutuskan untuk kembali bersekolah melalui jalur nonformal. 	
Referensi dan informasi lebih lanjut	<p>Fitur media resmi Kabupaten Bone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.bone.go.id/2020/10/03/wakil-bupati-bone-advokasi-gerakan-lisu-massikola-paimeng-untuk-raih-rekor-muri/ • www.sipbm.kemendesa.go.id/portal 	



**Informasi
kontak**

- Siti Eliza Mufti, Spesialis Pendidikan UNICEF (semufti@unicef.org)
- Suhaeni Kudus, Spesialis Pendidikan UNICEF (skudus@unicef.org)
- Perwakilan kabupaten/kota:
 - Hj. Samsidar, SPi., MSi - Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone (sidahhajja@yahoo.com)
 - Drs. Rahmansyah Lantara, MSi. – Kepala Bappelitbangda Kapupaten Takalar (ancha_lantara@yahoo.co.id)
 - DR. Hj. Khatmah Ahmad, SPi., MSi. – Kepala Bappepan Kabupaten Mamuju (khatmahahmad@yahoo.com)
- Vivi Andriani , Direktorat Agama, Pendidikan dandan Kebudayaan Bappenas (andriani@bappenas.go.id)
- Ir. Eppy Lugiarti, MP – Direktorat Pengembangan Sosial Budaya, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (elugiart@yahoo.com)



Meningkatkan Literasi Siswa Kelas Awal di Sekolah Perdesaan dan Terpencil

Topik: Keterampilan belajar dasar

Lokasi: Papua (Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, dan Mimika) dan Papua Barat (Manokwari dan Sorong)

Rangkuman Pendekatan	<p>Untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kesenjangan di sektor pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, UNICEF dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melakukan inisiatif program pendidikan untuk daerah terpencil dan pedesaan. Bertujuan untuk menguji pendekatan untuk meningkatkan hasil pembelajaran dalam literasi kelas awal di daerah pedesaan dan terpencil, program percontohan ini menargetkan 120 sekolah di enam kabupaten dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Program ini menggunakan dua model. Model A, untuk sekolah di daerah pedesaan dan terpencil, menggabungkan pelatihan klaster dengan dukungan dan pengawasan berbasis sekolah oleh tim pelatihan keliling. Model B, untuk sekolah di daerah terpencil dan terisolasi, memberikan pelatihan di tempat kerja di sekolah-sekolah.</p> <p>Struktur program tersebut didasarkan pada dua pilar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pilar 1 (tingkat sekolah): untuk mengatasi tantangan terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas karena kapasitas guru rendah dan kekurangan bahan bacaan. Seperti yang diidentifikasi dalam studi dasar (<i>baseline</i>), sekitar setengah dari jumlah guru di kabupaten sasaran tidak pernah menerima pelatihan untuk mengajar membaca. Demikian pula, mereka tidak menyusun atau menggunakan rencana pelajaran untuk proses pengajaran mereka. Program ini dimulai untuk meningkatkan kualitas pengajaran, desain, dan penyampaian bahan pembelajaran yang relevan dengan budaya setempat; memperkenalkan sistem untuk menilai kemajuan siswa dalam membaca; meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan inisiatif masyarakat; serta mendukung kepala sekolah dan komite sekolah untuk menyiapkan perencanaan sekolah, termasuk panduan perencanaan dan pemanfaatan dana operasional sekolah.• Pilar 2 (tingkat pemerintah dan sistem): untuk meningkatkan kesadaran di antara anggota parlemen dan pejabat pendidikan; menyebarkan bukti tentang keefektifan model; dan memberikan dukungan teknis untuk memasukkan kegiatan membaca kelas awal dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten. Tujuannya adalah untuk mempromosikan keputusan perencanaan dan penganggaran yang akan meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Hasil Penting yang Dicapai	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan perilaku guru dan praktik kelas: Lingkungan kelas menjadi lebih baik; pendekatan yang berpusat pada guru bergeser ke pendekatan yang berpusat pada siswa; proses belajar mengajar lebih terstruktur dan tepat sasaran dengan menggunakan rencana pelajaran dan penilaian siswa; serta motivasi guru meningkat. Terutama:<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan tajam di lingkungan kelas dengan menggunakan pojok baca dan materi pembelajaran yang ditampilkan di papan buletin, yang memiliki korelasi positif dengan peningkatan kemampuan membaca siswa. Studi menengah (<i>midline</i>) menunjukkan bahwa 75 persen ruang kelas memiliki pojok baca,

Hasil Penting yang Dicapai

- sedangkan dalam studi dasar hanya 20 persen.
- Pergeseran yang signifikan dari pendekatan guru sentris menjadi siswa sentris, serta lebih banyak menggunakan metode disiplin positif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran.
 - Penggunaan rencana pelajaran di sekolah intervensi meningkat dari 53 persen menjadi 88 persen di sekolah Model A dan dari 49 persen menjadi 87 persen di sekolah Model B. Sebaliknya, penggunaan rencana pelajaran di sekolah kontrol menurun dari 76 persen menjadi 69 persen.
 - 75 persen guru mampu melakukan penilaian siswa secara rutin dan sistematis untuk memeriksa tingkat keterampilan dan menginformasikan kegiatan literasi karena telah menerima pelatihan.
2. Keterampilan membaca dan pemahaman untuk siswa kelas 2 dan 3 di semua sekolah intervensi meningkat dibandingkan dengan sekolah non-intervensi: Persentase anak yang tidak membaca menurun dari 62 persen menjadi 26 persen; kefasihan lisan meningkat dari 5,6 kata per menit menjadi 12-13 kata per menit; dan pemahaman bacaan meningkat dari 6 persen menjadi 18 persen.
 3. Pemerintah di kabupaten sasaran memanfaatkan hasil-hasil program sebagai bukti untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan literasi kelas awal: Menyebarkan temuan evaluasi menengah menumbuhkan minat yang besar di kalangan pemerintah daerah untuk mereplikasi program.

Replikasi/ peningkatan skala program

Dukungan tingkat nasional terkait pengembangan kerangka kebijakan untuk mengadopsi model literasi kelas awal tampak dari diterbitkannya surat edaran kementerian dalam negeri pada tahun 2018, yang mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menerapkan literasi pendidikan. Sebuah pedoman replikasi dikembangkan dan disebarluaskan ke dinas pendidikan kabupaten. Di tahun 2020, replikasi dilakukan di Kabupaten Supiori dan Mamberamo Tengah dan di lebih banyak sekolah di kabupaten intervensi.

Biaya

Penetapan biaya didasarkan pada model yang akan diterapkan (A, B, atau campuran). Berikut adalah perkiraan tabulasi biaya tahunan per 5 sekolah dan perhitungan biaya per sekolah.

Kegiatan	Perkiraan Biaya dalam Rupiah	
	Model A	Model B
Pelatihan untuk pelatih (2)	70.400.000	75.200.000
Pelatihan guru internal	124.000.000	163.000.000
Rapat kelompok kerja guru dua mingguan	118.000.000	126.000.000
Pelatihan untuk komite sekolah (2)	30.800.000	48.800.000
Pelatihan trimester untuk kelompok kerja kepala sekolah	37.200.000	64.200.000
Pendampingan	27.000.000	148.500.000
Kegiatan kampanye (2)	20.000.000	20.000.000
Membangun pojok baca	30.000.000	30.000.000
Subtotal	458.200.000	675.700.000
Anggaran tanpa bahan bacaan per sekolah	91.640.000	135.140.000
Anggaran bahan bacaan per sekolah	10.401.215	10.401.215
Anggaran dengan bahan bacaan per sekolah	102.041.000	145.541.000
Anggaran per siswa (diasumsikan terdapat 100 siswa per sekolah)	1.020.410	1.455.410



	Kete-rampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pelatihan • Perencanaan dan penganggaran
	Pemangku kepen-tingan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pendidikan kabupaten/kota • Dinas pemberdayaan masyarakat desa • Bappeda • Dinas perpustakaan kabupaten • Anggota parlemen • Kepala desa • Pengawas sekolah • Kepala sekolah dan guru
Pembelajaran	<p>Pembelajaran teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajaran literasi paling efektif dan berkelanjutan jika diterapkan di semua jenjang kelas sekolah dasar, tidak hanya di kelas awal. • Penilaian literasi nasional berkala diperlukan untuk menyediakan data tentang pencapaian literasi siswa dan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten. • Pelibatan yang berkelanjutan dalam penyusunan kurikulum di tingkat nasional sangat penting untuk memastikan bahwa keterampilan pra-literasi dibangun sejak awal pendidikan dasar. <p>Pembelajaran terkait kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil berupa bukti berkualitas terkait potensi pembelajaran sangat penting untuk mengkampanyekan rasa kepemilikan di antara anggota parlemen • Mendemonstrasikan secara detail pelaksanaan program dalam konteks wilayah perdesaan dan terpencil yang penuh tantangan memberikan dampak kepada kebijakan; • Mengenali dan merancang pendekatan yang sesuai dengan kondisi Provinsi Papua sangat penting dalam memastikan keberhasilan program. • Analisis rantai sebab akibat yang menghubungkan berbagai faktor penyebab tingginya tingkat ketidakhadiran di sekolah dengan kebijakan terkait dan masalah-masalah implementasinya diperlukan agar rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti. <p>Pembelajaran terkait manajemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil sangat penting dan transformatif, mengubah pandangan pemerintah tentang tindakan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan di daerah terpencil dan terisolasi serta daerah perdesaan. • Penetapan biaya untuk replikasi perlu dibangun di tahap awal sehingga pemerintah mengetahui apa saja yang diperlukan untuk tahap perencanaan dan anggaran. • Replikasi program bergantung pada desain yang baik, dokumentasi bukti tentang masalah prioritas, dan ketentuan replikasi jika program percontohan berhasil. 	



Referensi dan informasi lebih lanjut

- Situs program: www.unicef.org/indonesia/documents/rural-and-remote-education-initiative
- Studi paruh program untuk Inisiatif Pendidikan di Perdesaan dan Daerah Terpencil untuk Provinsi Papua: www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-unicef-rural-and-remote-education-initiative-forpapuan-provinces-midline-study.pdf
- Video program: www.youtube.com/watch?v=dAXef9OJ1YU

Informasi kontak

- Aminuddin Ramdan, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF - Jayapura (aramdan@unicef.org)
- Abdullah Modhesh, Spesialis Pendidikan UNICEF (amodhesh@unicef.org)
- Prostasius Loby, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua (lobyadisdikpapua@gmail.com)
- Amelia Ibo, Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura (Ameliaibo280566@gmail.com)



Peran Forum Masyarakat dalam Pendidikan Desa dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kehadiran Anak di Sekolah

Topik: Pendidikan inklusif, Anak Tidak Sekolah (ATS)

Lokasi: Jawa Tengah (Brebes)

Rangkuman Pendekatan

Di Brebes, Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan upaya berbasis masyarakat yang bermula dari sebuah komunitas kecil di Facebook yang prihatin dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pemerintah kemudian memperkuat gerakan tersebut dengan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) hingga ke tingkat kabupaten. Meski tujuan jangka pendeknya adalah untuk menangani masalah anak tidak sekolah (ATS), tujuan jangka panjang gerakan ini adalah membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengatasi kemiskinan antargenerasi.

Pada tahun 2018, ATS di Brebes berjumlah sekitar 17.000 anak atau rata-rata 993 anak di setiap kecamatan yang terdiri atas:

- Anak yang putus sekolah dasar (15 persen)
- Anak yang gagal melanjutkan ke sekolah menengah pertama (32 persen)
- Anak yang putus sekolah menengah pertama (13 persen)
- Anak yang gagal melanjutkan ke sekolah menengah atas (36 persen)
- Anak yang putus sekolah menengah atas (4 persen)

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi seperti tersebut di atas: kebutuhan untuk bekerja guna membantu orang tua atau bermigrasi, tidak mampu membayar biaya sekolah, sakit, menikah, menyandang disabilitas, atau kurangnya motivasi.

Pada tahun 2016, Bupati Brebes mengeluarkan surat keputusan dengan tujuan untuk menangani masalah anak putus sekolah, yang mengharuskan koordinasi antarlembaga pemerintah, pembentukan FMPP dari tingkat desa ke kabupaten, pembuatan kebijakan, dan alokasi anggaran.

Kerja sama dengan UNICEF dalam pengembangan model pendidikan universal bagi semua anak di desa dimulai pada tahun 2017 di empat desa percontohan tempat FMPP dibentuk dan bekerja sama dengan pemerintah desa. UNICEF memfasilitasi penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk mengumpulkan data *real-time* sebagai dasar dalam menyusun rencana aksi di tingkat komunitas.

Hasil SIPBM ini efektif karena mampu memetakan dan menjangkau anak putus sekolah, bahkan hingga di tingkat rukun tetangga (RT). Kerja sama antara FMPP dan pemerintah desa berjalan lancar karena adanya intervensi yang dibuat berdasarkan data yang valid. Peran pemerintah desa juga penting untuk memperoleh dukungan finansial dari Dana Desa.

Aparat pemerintah desa dan kabupaten memilih pimpinan FMPP. Anggota FMPP dipilih oleh masyarakat dan terdiri atas perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh anak muda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan penduduk setempat. Partisipasi masyarakat di dalam kegiatan FMPP memiliki andil dalam penargetan yang lebih baik.



	<p>FMPP dilibatkan dalam penyiapan rencana desa tahunan, pengumpulan data, dan perumusan kegiatan untuk menangani ATS. Tujuannya adalah untuk mengadvokasi komitmen pemerintah desa guna memastikan bahwa semua anak di desa dapat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, dengan dukungan finansial dari Dana Desa, sektor swasta, atau donor.</p>						
Hasil Penting yang Dicapai	<ul style="list-style-type: none"> • 12.212 (dari total sekitar 17.000) anak putus sekolah, telah kembali bersekolah di lembaga pendidikan formal atau nonformal hingga tahun 2019. • Di keempat desa percontohan, semua anak putus sekolah kembali bersekolah (81 anak di Parareja, 221 di Cenang, 18 di Benda, delapan di Pepedan). • Desa menyusun strategi inovatif untuk mendorong anak-anak dan remaja kembali belajar. • Dalam rencana pembangunan desa yang disusun, Dana Desa telah dialokasikan untuk mengatasi masalah ATS. 						
Replikasi/ peningkatan skala program	<p>Keempat desa percontohan menjadi model dalam menangani ATS di tingkat desa. Replikasi ke desa lain dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan empat kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalatih tentang Perencanaan Pendidikan Berbasis Data dan Gerakan Kembali Bersekolah (dua sampai tiga hari) 2. Pelatihan di desa percontohan 3. Konfirmasi ulang data 4. Pendampingan <p>Kegiatan tersebut dilakukan setelah desa yang ingin melakukan replikasi mengumpulkan data menggunakan aplikasi SIPBM.</p> <table border="1" data-bbox="339 1193 1473 1697"> <tr> <td data-bbox="339 1193 493 1301">Biaya</td> <td data-bbox="499 1193 1473 1301"> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas FMPP Rp20 juta (1.500 dolar AS)/desa • Replikasi tingkat kabupaten Rp900 juta (61.500 dolar AS)/tahun </td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1310 493 1417">Keterampilan</td> <td data-bbox="499 1310 1473 1417"> <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan aplikasi SIPBM • Pendampingan dan pengembangan kegiatan inovasi pendidikan desa </td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1426 493 1697">Pemangku kepentingan</td> <td data-bbox="499 1426 1473 1697"> <ul style="list-style-type: none"> • Tim FMPP dan GKB di kabupaten, kecamatan, desa • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten • Dinas Pendidikan Kabupaten • Dinas Sosial Kabupaten • Kantor Kementerian Agama Provinsi </td> </tr> </table>	Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas FMPP Rp20 juta (1.500 dolar AS)/desa • Replikasi tingkat kabupaten Rp900 juta (61.500 dolar AS)/tahun 	Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan aplikasi SIPBM • Pendampingan dan pengembangan kegiatan inovasi pendidikan desa 	Pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim FMPP dan GKB di kabupaten, kecamatan, desa • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten • Dinas Pendidikan Kabupaten • Dinas Sosial Kabupaten • Kantor Kementerian Agama Provinsi
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas FMPP Rp20 juta (1.500 dolar AS)/desa • Replikasi tingkat kabupaten Rp900 juta (61.500 dolar AS)/tahun 						
Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan aplikasi SIPBM • Pendampingan dan pengembangan kegiatan inovasi pendidikan desa 						
Pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim FMPP dan GKB di kabupaten, kecamatan, desa • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten • Dinas Pendidikan Kabupaten • Dinas Sosial Kabupaten • Kantor Kementerian Agama Provinsi 						
Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tim FMPP yang baru dibentuk senantiasa memerlukan dukungan. • Kebijakan dan regulasi diperlukan untuk memperkuat peran FMPP. • Perlu adanya inovasi pendayagunaan sumber daya, misalnya melalui kerja sama antara FMPP dan pondok pesantren. 						



Referensi dan informasi lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kabupaten Brebes (www. sipbm.brebeskab. go.id/)• Situs Web Gerakan Kembali Bersekolah Kabupaten Brebes (www.gkb.brebeskab.go.id/)• Situs Web Gerakan Kembali Bersekolah Desa Parereja (www.parereja.desabrebes.id/)• Situs Web Gerakan Kembali Bersekolah Desa Cenang (www.cenang.desabrebes.id/)• Situs Web Forum Masyarakat Peduli Pendidikan tentang Gerakan Kembali Bersekolah (www.fmppbrebeskab. com/)
Informasi kontak	<ul style="list-style-type: none">• Suhaeni Kudus, Spesialis Pendidikan UNICEF, (skudus@unicef.org)• Rela Rahayuningsih, S.Sos, M.Si; Bappelitbangda Kabupaten Brebes (rellabbs@yahoo.co.id)• Bahrul Ulum, SE, M.Si; Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (cak.ulum@gmail.com)

